

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menganut sistem demokrasi. Salah satu parameter perkembangan demokrasi adalah semakin terbukanya kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses-proses politik atau yang dikenal dengan partisipasi politik. Dalam kaitan ini, keterlibatan warga negara secara aktif dalam kehidupan politik menjadi penting untuk menentukan arah perkembangan negara seperti membentuk pemerintahan demokrasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan.¹ Oleh karena itu, partisipasi warga negara dalam kehidupan politik merupakan prasyarat mutlak dalam sebuah tatanan negara yang demokratis.

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).² Dalam kaitan ini, Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson menemukan lima bentuk partisipasi pemilih dalam politik, yaitu diantaranya *Electoral activity* (kegiatan pemilihan), *Lobbying*, *Organizational activity*, *Contracting*, dan *Violence*.³ Adapun kegiatan pemilihan (*electoral activity*) yang dimaksud yaitu segala bentuk kegiatan yang

¹Yalvema Miaz, 2012, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Memilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, Padang: UNP Press, hlm. 21.

²Miriam Budiardjo, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 2.

³Samuel P Huntington dan Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16-18.

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilu, diantaranya adalah ikut memberikan sumbangan, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang mendukung dan memiliki sebuah nama atas nama tertentu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemilu, menilai calon-calon yang diajukan dan seterusnya.⁴

Lebih lanjut, Michael Rush dan Philip Althoff menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik, yang tergolong pada partisipasi politik adalah kegiatan pemilihan menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya, partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, *voting* (pemberian suara), dan apathi total⁵.

Diantara bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut, salah satu bentuk kongkrit partisipasi politik yang mudah ditemui sebuah negara demokrasi adalah keikutsertaan warga negara untuk memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum atau pemilu. Dalam hal ini, pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik yang terbiasa, yang melibatkan perilaku politik yang bersifat masif serta sering kali lebih luas di bandingkan dengan partisipasi politik lain.⁶ Bahkan menurut Budiardjo, bahwa dalam suatu negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari

⁴*Ibid.*,

⁵ Michael Rush dan Philip Althoff, "*Pengantar Sosiologi Politik*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal.122

⁶Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press, hlm. 20.

demokrasi itu.⁷

Pemilu merupakan sarana bagi pengejawantahan kedaulatan rakyat, dimana warga negara secara langsung terlibat dalam aktifitas politik dengan memberikan suaranya untuk menentukan/memilih pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil mereka yang akan mengisi jabatan publik dan pemerintahan. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana terbentuknya penyelenggara pemerintahan yang *legitimate* sesuai dengan aspirasi warga negara. Oleh karena itu, tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi politik warga negara dalam pemilu menjadi penting dalam menentukan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Dalam perkembangannya, tingkat partisipasi politik warga negara khususnya dalam Pemilu tidak selalu menunjukkan tingkatan yang sama. Dalam kaitan ini, ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik termasuk partisipasi politik dalam kegiatan Pemilu. Dilihat dari segi pemilih, Aspinall menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih. Salah satunya adalah faktor mobilisasi yang dilakukan oleh kandidat berupa barang dan uang yang ditawarkan kepada pemilih. Pemberian barang dan uang ini bertujuan agar mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya guna untuk memenangkan pemilihan. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi pemilih menurut Aspinall adalah penilaian pemilih terhadap masa lalu dari kandidat serta penilaian pemilih terhadap penampilan kandidat⁸.

Faktor lain yang cukup dominan dalam mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi politik warga negara adalah kesadaran politik. Menurut Ramlan Surbakti, apabila seseorang memiliki kesadaran politik

⁷Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 461.

⁸Jurnal tentang Pemilu 2014 Indonesia, oleh Edward Aspinall Marcus Mietzer

dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik yang dilakukan cenderung aktif, namun apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik yang dilakukan cenderung pasif-tertekan (apatid). Lebih lanjut, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan serta mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional.⁹

Selain itu, Miriam Budiardjo juga menegaskan bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.¹⁰ Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyaknya dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain masyarakat percaya bahwa kegiatan yang dilakukan mempunyai efek politik. Dari penjelasan tersebut jelaskan bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik.

Adanya hubungan kesadaran politik terhadap partisipasi politik warga negara juga lebih ditegaskan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, dimana seseorang yang memiliki informasi yang cukup lengkap tentang politik menyebabkan bertambah pengetahuan serta memunculkan perasaan berkompeten terhadap masalah politik tersebut (kesadaran politik) dan hal ini akan mendorong

⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: CV. Prima Grafika, 2013., Hal. 185

¹⁰Miriam Budiardjo, *Op. Cit.* hal. 369

seseorang tersebut untuk aktif dalam kehidupan politik.¹¹ Dalam analisa kesadaran politik, Gabriel A. Almond dan Sidney Verba dalam penelitiannya di lima negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko, memberikan ukuran untuk tingkat kesadaran politik ini dalam 3 macam pola yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif¹².

Aspek kognitif adalah kemampuan yang menyangkut pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik, peranan dan segala kewajibannya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya. Aspek ini merupakan aspek yang memiliki peran paling besar dalam mempengaruhi kesadaran politik individu. Selanjutnya, aspek afektif menyangkut perasaan seseorang terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuat seseorang menerima atau menolak sistem politik itu. Kemudian, aspek evaluatif, menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan¹³. Ketiga pola ini akan menjadi tolak ukur tingkat kesadaran politik seseorang, dimana kesadaran politik itu ditunjukkan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal kenegaraan termasuk pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dan negaranya.

Salah satu negara yang sangat menonjol dari hasil penelitian Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam mengukur kesadaran politik masyarakat adalah Meksiko. Meksiko adalah salah satu negara dimana masyarakatnya memiliki sikap

¹¹ Almond dan Verba, 1990. *Budaya Politik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 14-15.

¹² *Ibid.*, hlm. 55.

¹³ *Ibid.*, hal. 16

terbuka terhadap pemerintahan. Dari hasil penelitian, angka kesadaran politik masyarakat Meksiko sangat rendah, yaitu sebesar 25% masyarakat yang memiliki kesadaran politik. Masyarakat di Meksiko memiliki pandangan yang bertentangan dengan negara lainnya, dimana sebagian besar masyarakat di negara ini berpandangan bahwa pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka, pengaruh dari pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang merugikan. Masyarakat menganggap bahwa kehidupannya akan lebih baik tanpa adanya kegiatan-kegiatan pemerintah. Masyarakat di Meksiko memiliki keyakinan bahwa yang akan menolong mereka adalah keluarga dan teman terdekat, bukan pemerintah. Masyarakat percaya bahwa pemerintah tidak tertarik pada kepentingan orang-orang miskin dan orang-orang kecil, serta responsif jika ada uang semir atau terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemerintah. Kepercayaan tersebut tak terlepas dari keyakinan masyarakat Meksiko bahwa kegiatan pemerintah lokal diperuntukkan bagi partai yang berkepentingan. Pemerintah melakukan banyak propaganda, menjanjikan banyak hal tetapi kenyataannya tak seorangpun berbuat sesuatu untuk masyarakat. Namun hal menarik dari masyarakat Meksiko adalah terbuka, masyarakat dengan terbuka menyampaikan rangkaian pendapatnya tentang politik, meskipun pendapat yang disampaikan bersifat negatif tetapi mereka tidak sungkan dalam menyampaikan perasaannya terhadap pemerintah.

Di Indonesia sendiri, upaya demokratisasi terus dilakukan hingga ke tingkat daerah dengan diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung atau Pilkada langsung. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh

masyarakat setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersamaan dengan Wakil Kepala Daerah¹⁴. Dalam konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat masyarakat daerah. Melalui Pilkada langsung ini diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.

Namun persoalan kemudian adalah sistem Pilkada langsung ini belum diikuti dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil survey dari LSI (Lembaga Survey Indonesia) merata-ratakan total partisipasi politik masyarakat dalam pilkada masih sekitar 60%, atau dengan kata lain rata-rata jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada langsung mencapai angka 40%. Sejatinya golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum di manapun itu, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Hanya saja, tentunya hal ini dibatasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30%, meski banyak pemilihan yang jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40%. Hal tersebut setidaknya menggambarkan bahwa angka partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu di Indonesia masih rendah, meskipun Indonesia sendiri menerapkan system pemerintahan demokrasi.¹⁵

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵Dikutip dari Jurnal Revolt Institute tentang *Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out)*, pada tanggal 25 Agustus 2017.

Meskipun demikian, di tengah fenomena masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada langsung ini, ternyata juga masih ada sebagian daerah yang memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan partisipasi politik masyarakatnya dalam Pilkada langsung. Hal ini salah satunya terlihat pada Pilkada Payakumbuh tahun 2017. Di Sumatera Barat, ada 2 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017, yaitu Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai. Angka partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Mentawai lebih tinggi dibanding angka partisipasi politik masyarakat di Kota Payakumbuh. Partisipasi politik masyarakat tahun 2017 di Kabupaten Mentawai mencapai angka 80,51%. Namun angka tersebut mengalami penurunan dibanding pemilihan kepala daerah sebelumnya yang mencapai angka 81,05%. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mentawai menjelang pemilihan agar partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Mentawai. Meskipun begitu, angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mentawai lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi politik masyarakat Kota Payakumbuh.

Berbeda dengan Kabupaten Mentawai, salah satu daerah yang juga melaksanakan pilkada langsung adalah Kota Payakumbuh. Angka partisipasi politik masyarakat Kota Payakumbuh pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 adalah 68,3%, angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Mentawai. Meskipun begitu, partisipasi politik masyarakat di Kota Payakumbuh cenderung mengalami kenaikan dibanding tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, seperti

pada Pilkada Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 yang lalu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2012. Partisipasi politik pada Pemilihan Walikota tahun 2017 adalah angka partisipasi tertinggi dibandingkan dari empat kali pelaksanaan Pilkada dalam rentang 18 tahun terakhir di Kota Payakumbuh.

Pemilihan Kepala daerah Payakumbuh tahun 2017 diikuti oleh tiga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dimana pasangan calon nomor urut 2 (dua) Riza Falepi-Erwin Yunas berhasil meraih suara terbanyak sebesar 43,63%, disusul pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Suwandel Muchtar-Fitrial Bachri sebesar 37,03% suara, dan terakhir pasangan calon nomor urut 1 (satu) Wendra Yunaldi-Ennaidi sebesar 19,34% suara (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1
Persentase perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota
Pada Pilwako Payakumbuh Tahun 2017

No. Urut	Pasangan Calon	Persentase Perolehan Suara
1.	Wendra Yunaldi – Ennaidi	19,34%
2.	Riza Falepi – Erwin Yunas	43,63%
3.	Suwandel Muchtar – Fitrial Bachri	37,03%

Sumber : KPU Kota Payakumbuh 2017

Selain itu, dalam kaitan partisipasi politik, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Payakumbuh, tercatat bahwa sebanyak 57.743 orang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017 dari total 84.503 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya angka persentase partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Payakumbuh 2017 sebesar 68,3%, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar

31,7%.¹⁶ Jika dilihat dari lima Kecamatan, persentase tingkat partisipasi masyarakat di masing-masing Kecamatan pada Pilkada Payakumbuh tahun 2017 rata-rata di atas 60% atau berkisar pada angka 65% - 73% (lihat tabel 1.2).

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

No	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Persentase Partisipasi Per Kecamatan
1.	Lamposi Tigo Nagari	6.884	4.873	2.011	70,8%
2.	Payakumbuh Barat	33.051	21.648	11.403	65,5%
3.	Payakumbuh Selatan	7.182	5.169	2.013	71,8 %
4.	Payakumbuh Timur	17.543	12.126	5.417	69,1%
5.	Payakumbuh Utara	19.843	13.927	5.916	70,2 %
Total		84.503	57.743	26.760	
Persentase		100,0%	68,3%	31,7%	

Sumber: KPU Kota Payakumbuh

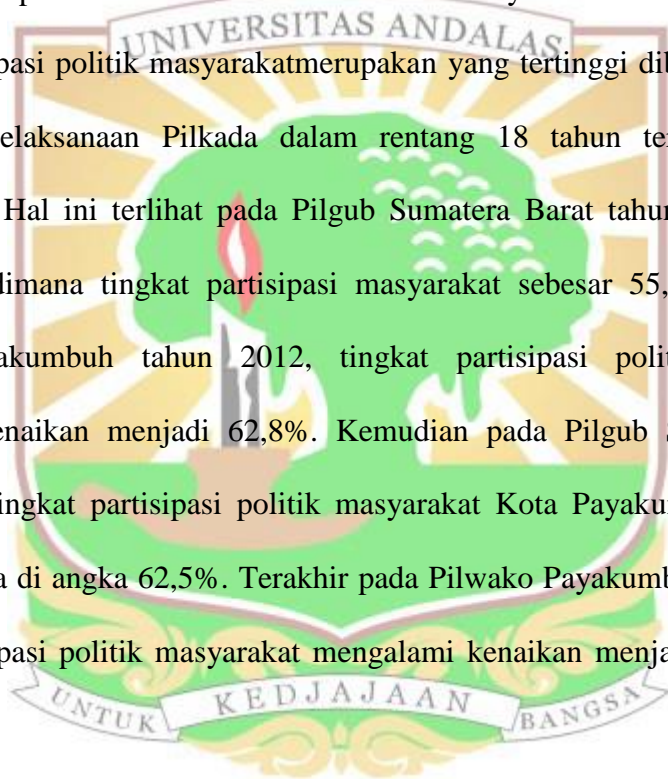
Berdasarkan data di atas, dengan tingkat partisipasi politik masyarakat sebesar 68,3% pada Pilwako Payakumbuh tahun 2017 yang lalu, sebenarnya tidak terlalu menunjukkan tingkat partisipasi politik tinggi. Bahkan angka partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh pada Pilkada 2017 tidak mencapai angka partisipasi yang telah ditargetkan sebelumnya oleh KPU Kota Payakumbuh, yaitu sebesar 77,5%. Meskipun demikian, tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Payakumbuh tahun 2017 ini mengalami peningkatan dibanding tingkat partisipasi pada Pilkada Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 yang lalu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Payakumbuh Muhammad Khadafi yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggara pilkada menargetkan partisipasi masyarakat Payakumbuh menggunakan hak pilihnya 77,5 persen, akan tetapi partisipasi masyarakat untuk memilih cukup baik. Walau belum mencapai

¹⁶Dikutip dari https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/sumatera_barat/kota_payakumbuh, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

*target, partisipasi pilkada lebih tinggi dibanding Pilgub Sumbar 2015, dimana partisipasi masyarakat hanya 62,5 persen. Meskipun tidak mencapai target, partisipasi masyarakat mendekati apa yang diharapkan penyelenggara pilkada”.*¹⁷

Selain itu, hal yang cukup menarik adalah bahwa dari empat kali pelaksanaan Pilkada dalam rentang 18 tahun terakhir di Kota Payakumbuh, baik Pilgub maupun Pilwako, tingkat partisipasi politik masyarakat cenderung meningkat atau mengalami kenaikan hingga pada Pilwako Payakumbuh tahun 2017. Bahkan pada Pilkada atau Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017 ini, tingkat partisipasi politik masyarakat merupakan yang tertinggi dibandingkan dari empat kali pelaksanaan Pilkada dalam rentang 18 tahun terakhir di Kota Payakumbuh. Hal ini terlihat pada Pilgub Sumatera Barat tahun 2010 di Kota Payakumbuh, dimana tingkat partisipasi masyarakat sebesar 55,0%. Lalu pada Pilwako Payakumbuh tahun 2012, tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami kenaikan menjadi 62,8%. Kemudian pada Pilgub Sumatera Barat tahun 2015, tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Payakumbuh cenderung stagnan berada di angka 62,5%. Terakhir pada Pilwako Payakumbuh tahun 2017, tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami kenaikan menjadi 68,3% (lihat tabel 1.3).



Tabel 1.3
Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dari Empat Kali Pelaksanaan Pilkada Langsung (Pilgub atau Pilwako) di Kota Payakumbuh dalam Rentang 18 Tahun Terakhir

Pilkada Langsung	Tingkat Partisipasi
Pilgub Sumbar Tahun 2010	55,5%
Pilwako Payakumbuh Tahun 2012	62,8%
Pilgub Sumbar Tahun 2015	62,5%
Pilwako Payakumbuh Tahun 2017	68,3%

Sumber : KPU Kota Payakumbuh

¹⁷Dikutip dari <http://sumbar.antarane.ws.com/berita/198123/kpu-payakumbuh-partisipasi-pemilih-cukup-baik.html>

Terjadinya peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kota Payakumbuh dalam empat kali pelaksanaan Pilkada terakhir menjadi fenomena yang menarik untuk lebih dikaji secara mendalam, terutama pada Pada Pilwako Payakumbuh pada tahun 2017, dimana tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka tertinggi dan mengalami kenaikan signifikan. Hal ini tentunya menarik untuk menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi politik masyarakat payakumbuh pada Pilkada Payakumbuh pada tahun 2017 yang lalu.

Dalam kaitan ini, peneliti menduga bahwa meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017 yang lalu disebabkan oleh kesadaran politik masyarakat yang cenderung meningkat, terutama dalam kaitan pelaksanaan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah mereka, sehingga mendorong masyarakat untuk ikut serta memberikan hak suaranya pada Pilkada Payakumbuh tahun 2107. Artinya, bahwa adanya kecenderungan pengaruh kesadaran politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.

Adanya kecenderungan meningkatnya kesadaran politik masyarakat ini bisa terlihat dari keyakinan sebagian masyarakat untuk tetap menyuarakan kepentingannya dengan berpartisipasi dalam aktifitas Pilkada Payakumbuh tahun 2017 yang lalu, meskipun kecewa dengan janji-janji dan perilaku dari para elit atau pejabat politik/pemerintahan. Diantaranya yaitu adanya rasa antusias mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh, Hal ini seperti yang disampaikan oleh Darmayunis salah seorang warga Kota Payakumbuh dan merupakan pedagang keliling makanan yang menyatakan bahwa :

“Saya tahu banyak masyarakat yang kecewa akan janji-janji manis yang disampaikan oleh para pejabat publik menjelang saat pemilihan, namun

apabila kita larutkan kekecewaan itu, yang ada kita semakin tidak diperhatikan, lebih baik kita hilangkan sifat kekecewaan itu dan berupaya agar tuntutan, kebutuhan dan segala macamnya kita sampaikan kepada pemerintah, meskipun sedikit kemungkinan akan tersalurkan, namun setidaknya kita sudah berusaha, apalagi saya hanyalah seorang pedagang keliling, kadang punya uang kadang tidak, saya berharap agar rakyat kecil seperti saya dapat diperhatikan. Makanya saya ikut sosialisasi kemaren, saya menyampaikan segala keluh kesah saya, setidaknya apa yang saya rasakan telah didengar mereka”¹⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Winda Mustika Yani, salah satu mahasiswa Universitas Andalas jurusan Manajemen dan merupakan penyandang disabilitas, beliau menyatakan bahwa:

“Awalnya saya tidak tahu Pilwako akan dilaksanakan, karena kalau dirumah saya ya tidur-tidur saja, jarang keluar rumah, apalagi saya sulit berjalan, paling duduk-duduk aja sambil nonton televisi. Tapi waktu itu saya mendengar orang KPUD datang ke daerah tempat saya tinggal, dan disana mereka melaksanakan diskusi serta sosialisasi kecil-kecilan, saya tertarik melihat warga datang untuk menyampaikan aspirasi mereka, makanya saya juga datang pada saat pemilihan, setidaknya nambah satu suara kan lumayan”¹⁹

Adanya antusiasme sebagian masyarakat untuk mengikuti aktifitas-aktifitas politik dalam Pilkada, seperti mengikuti sosialisasi yang Pilwako yang dilaksanakan KPU Kota Payakumbuh, juga dibenarkan oleh Yuzalmon, merupakan Komisioner di Kantor KPU Kota Payakumbuh, beliau menyebutkan bahwa :

“Masyarakat Kota Payakumbuh respon terhadap berbagai kegiatan yang diadakan, masyarakat cukup antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, seperti halnya pada saat debat kandidat, sekitar 90% masyarakat yang diundang hadir dalam debat tersebut, kehadiran itu sama sekali tidak dimobilisasi dan juga tidak dibayar untuk hadir, memang keinginan dari mereka sendiri. Kemudian dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat cukup respon, namun ada juga yang bersikap apatis, dan tentu tidak semuanya masyarakat yang terlibat. Pada saat sosialisasi mayoritas masyarakat ketika diundang mereka ikut, mau bertanya, dan apabila dipancing-pancing maka antusias mereka sangat

¹⁸Wawancara awal dengan Darmayunis, Warga Kota Payakumbuh, Pada tanggal 16 Agustus 2017.

¹⁹Wawancara awal dengan Winda Mustika Yani, Mahasiswa Universitas Andalas asal Kota Payakumbuh, Pada tanggal 11 September 2017.

*menggelegak, dan pertanyaan dari masyarakat cukup menarik. Dari pihak KPU juga memiliki usaha untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dimana KPU Kota Payakumbuh melakukan Voter Education terhadap semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, penyandang disabilitas, dan juga melaksanakan diskusi publik sampai ke tingkat kelurahan”.*²⁰

Selain itu, adanya kesadaran politik ini juga terlihat dari kuatnya rasa kesadaran dari sebagian masyarakat Kota Payakumbuh tentang pentingnya memberikan suara sebagai hak warga negara, dan keyakinan bahwa memberikan suara dalam Pilkada akan membawa perubahan bagi kehidupan mereka kedepan oleh Kepala Daerah terpilih nantinya. Hal ini tergambar dari pernyataan Afrizal yang merupakan pedagang dan penjahit pakaian, beliau menyatakan bahwa :

*“Ya jelaslah saya ikut memilih, itu hak kita sebagai warga negara untuk memilih pemimpin kita. Apalagi sudah berapa kali orang dari KPUD datang mensosialisasikan tentang Pilwako, bahkan ke daerah saya yang lumayan jauh dari kota mereka datang. Malu saya kalau tidak memilih, meskipun saya bekerja tanpa tau hari libur yang seharusnya menambah pendapatan kalau tidak hadir memilih, tapi saya malu. Saya ingin kehidupan kami akan lebih baik dan berharap janji pemerintah itu tidak sekedar janji saja”.*²¹

Meningkatnya kesadaran politik ini juga bisa terlihat dari antusias sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan Pilwako Payakumbuh tahun 2017 tersebut. Hal ini tergambar dari sebagian masyarakat yang tidak terdaftar di DPT, mereka tetap berkeinginan untuk mencoblos dengan membawa KTP atau Surat Keterangan. Berikut tabel jumlah masyarakat Kota Payakumbuh yang memilih dengan menggunakan KTP atau Surat Keterangan :

²⁰Wawancara dengan Bapak Yuzalmon yang merupakan salah satu staff penting di KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 19 Oktober 2017, puku 10.50 WIB di Kantor KPU Kota Payakumbuh.

²¹Wawancara awal dengan Afrizal, Warga Kota Payakumbuh, Pada tanggal 28 September 2017.

Tabel 1.4
Jumlah Masyarakat Kota Payakumbuh yang Menggunakan Hak Pilih dengan
Menggunakan KTP dan Surat Keterangan pada Pilwako
Kota Payakumbuh Tahun 2017

No.	Kecamatan	LK	PR	Jumlah
1.	Lamposi Tigo Nagari	15	10	25
2.	Payakumbuh Barat	124	137	261
3.	Payakumbuh Selatan	14	21	35
4.	Payakumbuh Timur	45	47	92
5.	Payakumbuh Utara	63	59	122
Jumlah		261	274	535

Sumber : KPU Kota Payakumbuh

Dari realitas di atas, setidaknya menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilwako Payakumbuh tahun 2017 yang lalu juga diiringi oleh kecenderungan meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Hal ini tergambar dari antusiasme sebagian masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh terkait Pilwako, serta juga adanya rasa keyakinan serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan akan membawa perubahan bagi Kota Payakumbuh kedepan. Hal ini lah yang menurut asumsi peneliti mendorong sebagian besar masyarakat untuk ikut memberikan suaranya dalam Pilwako Payakumbuh tahun 2017. Bahkan, sebagian masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pun, mau ikut serta memberikan hak suaranya melalui KTP atau pun surat keterangan.

Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana sebagian masyarakat di Kota Payakumbuh meyakini pentingnya untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada, dan ini tentunya memperlihatkan kecenderungan tingginya kesadaran politik seseorang akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam aktifitas politik, terutama dalam memberikan suaranya pada Pilkada Payakumbuh tahun 2017 yang lalu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh Kesadaran Politik

terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Payakumbuh pada Pilwako Tahun 2017.

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat adanya pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat khususnya pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017. Yang mana kesadaran politik itu dapat dilihat dari 3 pola, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Berdasarkan hasil temuan data awal, kecenderungan meningkatnya tingkat partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari kesadaran politik masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menjelang dilaksanakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2017. Dalam hal ini terlihat bahwa adanya kesadaran masyarakat Kota Payakumbuh untuk ikut terlibat dalam sosialisasi tersebut.

Selanjutnya, dalam hasil temuan data awal ditemukan bahwa terdapat beberapa masyarakat Kota Payakumbuh yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun dalam hal ini masyarakat tersebut tetap memiliki keinginan untuk ikut memilih dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada saat hari pemungutan suara. Selain itu dengan kondisi masyarakat Kota Payakumbuh yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang tidak menurunkan minat masyarakat untuk ikut mencoblos pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada tahun 2017. Hal ini terlihat ketika hari pemugutan suara, para pedagang tersebut rela meninggalkan dagangan mereka demi ikut mencoblos di TPS, padahal jika mereka tetap

berdagang mereka dapat keuntungan dari dagangan mereka. Dalam hal ini peneliti mengasumsikan bahwa masyarakat Kota Payakumbuh memiliki kesadaran politik dalam berpartisipasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada tahun 2017.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang diteliti secara rinci adalah: Sejauhmanapengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Langsung Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017?

1.3. Tujuan Penulisan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan didalam latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Langsung Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada atau Pemilu, terutama faktor kesadaran politik, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai partisipasi politik, khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam Ilmu Politik.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik dan menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada ke depannya.

